

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam meningkatkan kualitas, kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, maka diperlukan penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintahan dan juga mengikuti Peraturan Menteri serta mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahunnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Semua aturan ini bertujuan untuk mengontrol dan mengatur laporan keuangan daerah agar benar-benar efektif efisien, adil dan bertanggungjawab serta bermanfaat bagi masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut di atas di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan akuntabilitas dan publik serta transparansi. Hal ini dikarenakan adanya pemberian kewenangan secara luas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pemberian kewenangan tersebut dapat dikontrol yaitu dengan diwajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari 7 komponen yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan, antara lain Laporan Arus Kas. Laporan

ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran tentang mutasi kas akibat dari aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan mempunyai kewajiban untuk membangun dan meningkatkan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur secara demokratis, adil, dan merata. Agar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu ataupun terhenti karena kesalahan dalam pengambilan keputusan yang disebabkan karena keterbatasan dana atau kas, maka pemerintah Provinsi NTT harus memperhatikan kondisi keuangan yang salah satunya yaitu laporan arus kas.

Untuk mengetahui persoalan arus kas bersih pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berikut akan disajikan rincian jumlah arus kas bersih Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Arus Kas Bersih**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Tahun 2017-2019**

No	Arus Kas Bersih	TAHUN		
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Aktivitas Operasional	548.203.447.112,00	463.695.606.518,55	875.180.981.189,00
2.	Aktivitas Investasi	(482.866.143.140,00)	(529.444.911.303,00)	(798.153.226.497,00)
3.	Aktivitas Pendanaan	(74.389.654.204,00)	4.688.175.051,00	(7.192.963.579,00)
4.	Aktivitas Transitoris	-	-	-

*Sumber: BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021*

Berdasarkan data diatas, Laporan Arus Kas pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2017-2019 menunjukkan bahwa pada aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dan penurunan atau berfluktuasi, hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2017-2019 dan pada aktivitas investasi mengalami kenaikan defisit dari tahun anggaran 2017-2019, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada aktivitas lain dalam arus kas di tahun yang akan datang pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan fenomena masalah di atas, peneliti merasa perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh terkait terjadinya peningkatan dan penurunan pada aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan serta kenaikan defisit pada aktivitas investasi dalam laporan arus kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Analisis Arus Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2017-2019 jika dilihat dari aspek pertumbuhan, arus kas perkomponen dan arus kas bebas.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Arus Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2017-2019 dilihat dari aspek pertumbuhan, arus kas perkomponen dan arus kas bebas

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai hasil dari analisis laporan arus kas tahun anggaran 2017-2019 dan implikasinya terhadap penelitian kinerja pemerintah Provinsi NTT.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian tentang laporan arus kas pemerintah daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai Laporan Arus Kas pada masa yang akan datang.